

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* memberikan gambaran tentang situasi dimana manajer dimotivasi untuk mencapai tujuan organisasi daripada tujuan individu. Menurut Donaldson & Davis, (1991) mengemukakan dalam “*Toward a Stewardship Theory of Management*” dalam teori *stewardship*, manajer mementingkan *principal* daripada kepentingan pribadi. Dengan kata lain, menurut teori ini, manajer akan bertindak berdasarkan keinginan pemilik (*principal*). Teori ini berasumsi bahwa teori *stewardship* didasarkan pada karakter manusia yakni konsisten, memiliki integritas tinggi, mampu bekerja penuh tanggungjawab, serta dapat berperilaku jujur yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Teori ini pun menggambarkan ikatan yang kuat antara kepuasan pelanggan dan kesuksesan organisasi.

Teori *stewardship* ini dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi publik seperti organisasi pemerintahan dan nonprofit lainnya. Tata kelola di pemerintahan lebih cenderung bertindak sebagai *steward* (pelayan) daripada sebagai agent karena mereka diharuskan untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan pemimpin. Pemerintah berupaya melakukan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi dengan tidak memprioritaskan kepentingan individu atau pribadi. Sebagai *steward*, pemerintah harus menerbitkan laporan

keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik atas tindakannya. Akuntansi secara umum adalah suatu pengendalian diri serta sebagai suatu metode untuk melaporkan aktivitas manager atas manajemen keuangan dan sumber daya manusia. Dengan adanya batasan, pemegang sumber daya memberikan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut kepada *steward*. Kontrak hubungan antara *principal* dan *steward* didasari atas kepercayaan, kooperatif sesuai dengan tujuan organisasi. Sehingga teori *stewardship* yang bertanggung jawab dapat diterapkan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah.

Penerapan teori *stewardship* untuk penelitian ini, yaitu dapat digunakan untuk menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai entitas yang dapat diandalkan, dapat memberikan pelayanan yang tepat untuk publik, mampu memenuhi harapan masyarakat, dan mampu bertanggung jawab mengelola keuangan yang dipercayakan kepadanya, sehingga kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik bisa dicapai secara merata dan semaksimal mungkin. Hal ini didukung penelitian yang dilaksanakan oleh (Rizka S et al., 2021) bahwa teori *stewardship* juga menjelaskan untuk memastikan bahwa suatu organisasi berhasil, masyarakat dapat bergantung pada pemerintah sebagai penyedia layanan.

Berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, terdapat hubungan positif antara kualitas laporan keuangan dan teori *stewardship*, yaitu informasi yang lebih berkualitas. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan, pemerintah bertanggung jawab menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik masalah ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam hal ini, untuk mendapatkan laporan

keuangan yang berkualitas perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompentensi, dan kompetensi yaitu karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), serta kemampuan (*ability*) yang berpengaruh terhadap cara seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik diperlukan adanya sistem pengendalian intern dan teknologi informasi sebagai alat pendukung dalam menyajikan laporan keuangan yang digunakan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan dengan tepat waktu (Sundari & Rahayu, 2019).

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

PSAP No 1 ayat 9, PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan dianggap berkualitas, jika laporan keuangan memenuhi persyaratan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sebaliknya, ayat 1 dari Pasal 1 PP No. 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah cara pertanggungjawaban pemerintah negara atau daerah selama satu periode. Kualitas laporan keuangan acuannya yaitu laporan keuangan memberikan pemahaman yang akurat mengenai keadaan keuangan perusahaan dan kinerjanya, yang membantu menilai baik saat ini maupun di masa depan. Semakin jelas dan rinci data keuangan, semakin mencapai kebenaran (Ridzal et al., 2022). Kualitas laporan keuangan juga bisa dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) diciptakan pemerintah untuk mengatur laporan keuangan. Proses ini bertujuan untuk

memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi persyaratan Standar Akuntansi Pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Sistem pengendalian yang efektif adalah kumpulan tindakan yang dipilih oleh organisasi untuk memastikan bahwa laporan keuangan maupun non-keuangan yang akurat, seperti mematuhi peraturan dan prosedur yang akan memastikan tercapainya tujuan organisasi (Binawati, 2022).

Hasil dari proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi keuangan yang terjadi di entitas akuntansi pemerintah daerah yang tersedia saat ini disebut laporan keuangan SKPD. Laporan ini digunakan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban untuk tugas pengendalian keuangan serta pengambilan keputusan ekonomi melalui pihak-pihak yang memerlukan (Erlina et al., 2015).

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

PP RI No. 60 Tahun 2008, menguraikan sistem pengendalian intern mencakup semua proses yang integral pada tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh karyawan secara terus menerus untuk memberikan kepercayaan bahwa hal ini mampu mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan (Philadelphie et al., 2020). Pengendalian intern terdiri atas aturan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, menyediakan informasi keuangan yang akurat, dan menjamin bahwa peraturan dan hukum yang berlaku dipatuhi. Apabila sistem pengendalian internnya tinggi maka proses akuntansi dapat diatur, diawasi, dan

dapat ditemukan adanya penggelapan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencapai tujuan dan memberikan informasi yang andal (Swastiani et al., 2021).

Dalam menyusun LKPD, pengendalian intern digunakan untuk mengawasi dan mengendalikannya agar memenuhi persyaratan yang berlaku dan mencapai LKPD yang berkualitas (Sundari & Rahayu, 2019). Perusahaan menyediakan kekayaan negara dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan, SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang umum digunakan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Ridzal et al., 2022). Pengendalian internal sangat penting untuk mencapai target perusahaan, baik bisnis maupun sektor publik, seperti pemerintah. Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kesesuaian dengan SAP dan sistem pengendalian internal, perihal ini didukung dengan yang ada pada Lampiran I Permendagri No. 4 Tahun 2008.

Akibatnya, sistem pengendalian intern ini sangat diperlukan untuk mengawasi dan mengendalikan dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai khususnya pada pemerintahan guna mengantisipasi adanya kecurangan maupun penyalahgunaan pada laporan keuangan tersebut sehingga apabila terjadi kesalahan akan dapat langsung terdeteksi. Selain itu, untuk mencapai tujuannya sistem pengendalian intern juga memastikan bahwa dalam penyusunannya telah mematuhi peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dewi et al., (2022) menyatakan hasil laporan keuangan bergantung pada pelaksana atau sumber daya manusianya, sumber daya manusia yang tidak memadai kini tidak akan dapat menyelesaikan tugas secara efisien, efektif, dan ekonomis, sehingga pekerjaan tidak lagi dapat dihasilkan tepat waktu. Pengelolaan keuangan daerah wajib memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang baik, seringkali mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan pengalaman dalam penerapan sistem akuntansi yang ada (Philadelphiah et al., 2020). Sumber daya manusia terdiri dari unsur yang sangat penting bagi organisasi, dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat berpengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Karakteristik yang dimiliki seseorang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya disebut kompetensi (N. K. D. Lestari et al., 2022).

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan potensial yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan dapat diterapkan pada tugas dan fungsi jabatan seseorang dengan tujuan dapat melaksanakan tugas tersebut secara profesional, efektif dan efisien (Binawati, 2022). Penilaian sumber daya manusia dalam suatu organisasi pelaksanaan pekerjaannya meliputi tingkat tanggung jawab dan kompetensi sumber daya manusia, sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik pula (Kusumah & Rahayu, 2021). Dengan adanya sumber daya manusia dapat menghemat waktu dalam pembuatan laporan keuangan, karena mempunyai pengetahuan dan

pemahaman informasi mengenai laporan keuangan yang dapat diselesaikan dan disajikan secara tepat. Jika kompetensi pembuatan laporan keuangan baik, maka hasil kinerja yang dihasilkan juga baik (Sundari & Rahayu, 2019).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berkaitan dengan para pengelola keuangan serta pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan LKPD dan merupakan pilar utama yang mendukung dan memotivasi organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya. Didukung dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yaitu pengetahuan, keterampilan dan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan tentunya melalui latar belakang yang memadai, sering melakukan pelatihan, pengalaman dan pendidikan akuntansi yang layak. Dalam organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkompeten salah satu hal yang sangat penting, karena untuk menyusun laporan keuangan dibutuhkan seseorang yang memahami peraturan dan kode etik yang berlaku dan dapat dipercaya untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan tersebut. Sumber daya manusia yang berkompeten tentu akan mempersingkat waktu pada saat pembuatan laporan keuangan dan dapat dihasilkan laporan keuangan yang andal dan berkualitas.

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sundari & Rahayu, (2019) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, memproses data, menyimpan data dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi dalam pengambilan keputusan. Sistem

informasi keuangan daerah mengatur bagaimana pemerintah daerah harus menggunakan teknologi informasi ditetapkan dalam PP Nomor 56 Tahun 2005. Pemerintah daerah harus membuat dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan dalam proses pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan secara andal dan terpercaya, dan dapat mengarahkan informasinya kepada pelayanan publik (Dewi et al., 2020). Pemanfaatan teknologi informasi ialah sikap akuntan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan efisiensi kinerjanya. Teknologi informasi telah menjadi suatu kebutuhan dan persyaratan wajib bagi organisasi dalam menjalankan bisnis untuk mencapai tujuannya (Binawati, 2022).

Semua teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan informasi yang mencakup perangkat lunak (*mainframe, mini, micro*), database dan jaringan seperti menggunakan teknologi informasi (Ridzal et al., 2022). Teknologi yang difungsikan untuk mengoperasi, mencadangkan dan menyebarkan informasi adalah teknologi informasi. Teknologi yang baik dapat mempercepat sistem pemrosesan pengolahan data transaksi dan penyampaian laporan keuangan, sehingga nilai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat terjaga (N. K. D. Lestari et al., 2022). Pemanfaatan merupakan perilaku pegawai teknologi dalam mengelola tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam aplikasi yang dijalankannya. Pemanfaatan teknologi ini dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data dan diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan yang andal, cepat dan akurat (Wardani & Andriyani, 2017).

Jadi teknologi informasi adalah teknologi yang di dalamnya dapat digunakan untuk memproses data, mengolah data, menyimpan data dan memanipulasi data. Pemanfaatan teknologi informasi adalah teknologi yang dimanfaatkan oleh pegawai untuk menjalankan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan proses pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dihasilkan secara andal dan terpercaya ditunjang melalui bantuan sumber daya manusia yang siap untuk memakai teknologi informasi supaya informasi yang dihasilkan juga dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini adalah salah satunya tolok ukur penelitian yang dapat menyempurnakan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang) Wahyu Aswandi	X1: Kompetensi sumber daya manusia X2: Pemanfaatan teknologi informasi X3: Pengawasan Y: Kualitas laporan keuangan	1. Kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Pengawasan berpengaruh signifikan positif

	2018		terhadap kualitas laporan keuangan.
2.	<p>Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Ni Luh Wayan Tiya Lestari, dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi 2020</p>	<p>X1: Pemahaman akuntansi</p> <p>X2: Pemanfaatan sistem informasi akuntansi</p> <p>X3: Sistem pengendalian intern</p> <p>Y: Kualitas laporan keuangan</p>	<p>1. Pemahaman akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
3.	<p>Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada</p>	<p>X1: Kompetensi sumber daya manusia</p> <p>X2: Sistem pengendalian internal</p> <p>Y: Kualitas laporan keuangan</p> <p>Z: Kesuksesan penerapan sistem informasi</p>	<p>1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>2. Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.</p>

	Pemerintah Daerah Kota Jambi) Anggie Rizka S, Zamzam, Muhammad Gowon 2021		
4.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu Siti Hasanah, Tapi Rumondang Sari Siregar 2021	X1: Penerapan standar akuntansi pemerintah X2: Sistem informasi akuntansi X3: Sistem pengendalian intern X4: Kompetensi sumber daya manusia Y: Kualitas laporan keuangan	1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan 3. Sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
5.	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Teknologi Informasi dan	X1: Sistem pengendalian internal	1. Sistem pengendalian internal, penerapan teknologi informasi dan kompetensi

	<p>Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021)</p> <p>Iqbal Tanjung Kusumah, Sri Rahayu 2021</p>	<p>X2: Penerapan teknologi informasi</p> <p>X3: Kompetensi sumber daya manusia</p> <p>Y: Kualitas laporan keuangan</p>	<p>sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.</p> <p>4.</p>
6.	<p>Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan PT. Hadji Kalla Toyota</p> <p>Ummu Kalsum, Mursalim, Sulastri, Edy Susanto 2021</p>	<p>X1: Sistem pengendalian internal</p> <p>X2: Good corporate governance</p> <p>Y: Kualitas laporan keuangan</p>	<p>1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>2. Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
7.	<p>Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada</p>	<p>X1: pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>X2: kompetensi sumber daya manusia</p> <p>X3: sistem pengendalian intern</p>	<p>1. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>

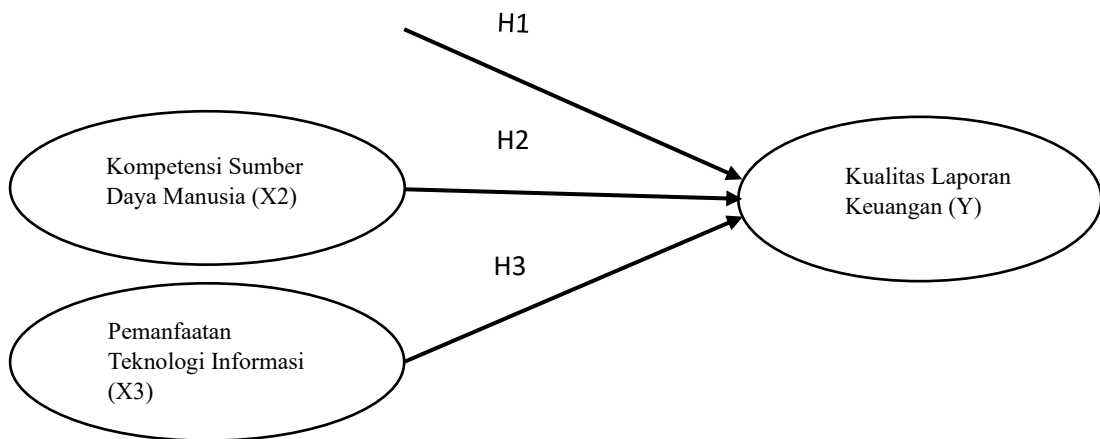
	<p>Pemerintah Daerah Kota Semarang)</p> <p>Raihana Anasfathin Gunawan, Hardiwinoto, Ida Kristiana, Fatmasari Sukesti, Alwiyah</p> <p>2021</p>	<p>Y: Kualitas laporan keuangan</p>	<p>3. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
8.	<p>Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Memoderasi Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD Se-Kecamatan Penebel</p> <p>Ni Komang Desi Lestari, Ni Putu Ayu Kusumawati, I Putu Nuratama</p> <p>2022</p>	<p>X1: Pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>X2: Sistem pengendalian intern</p> <p>Y: Kualitas laporan keuangan</p>	<p>1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>2. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
9	<p>Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan</p>	<p>X1: Sistem akuntansi keuangan daerah</p> <p>X2: Kompetensi sumber daya manusia</p>	<p>1. Sistem akuntansi daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan</p>

	Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klaten) Enita Binawati 2022	X3: Sistem pengendalian intern X4: Pemanfaatan teknologi informasi Y: Kualitas laporan keuangan	teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
10.	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Ni Putu Riska Fernanda Dewi, Ni Putu Yuria Mendra, Putu Wenny Saitri 2022	X1: Penerapan sistem akuntansi keuangan X2: Pemanfaatan teknologi informasi X3: Sistem pengendalian intern X4: Kompetensi sumber daya Y: Kualitas laporan keuangan	1. Penerapan sistem akuntansi keuangan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.3 Kerangka Konseptual

Untuk menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen pada penelitian ini adalah kerangka konseptual. Variabel independen

dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang dapat diambil berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dan dihubungkan dengan teori-teori saat ini ditunjukkan berikut:

2.4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sumber daya suatu organisasi diatur, diawasi, dan dinilai melalui sistem pengendalian intern. Memiliki peran penting untuk mencegah dan mengidentifikasi penggelapan dan melindungi sumber daya institusi (Dewi et al., 2022). Tujuan manajemen dalam menerapkan sistem pengendalian intern adalah untuk memastikan bahwa data pelaporan keuangan dapat dipercaya. Penerapan ini akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* pada kualitas dan keandalan informasi laporan keuangan.

Teori *stewardship* menjelaskan pemerintah daerah sebagai suatu entitas yang mampu bertindak sesuai kepentingan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar, dan membuat pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah untuk memungkinkan tercapainya tujuan fiskal dan pelayanan publik dapat dimaksimalkan. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, *steward* mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya pada pengendalian intern yang efektif agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Haryanti, (2016) bahwa kepentingan manajer dan *principal* memiliki tujuan yang sama dalam organisasi, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab membangun pola yang kuat untuk membuat laporan keuangan berkualitas tinggi.

Dalam penelitian Siwambudi et al., (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan pengendalian intern keuangan yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, semakin baik implementasi sistem pengendalian intern, semakin layak kualitas laporan keuangan yang dibuat. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Rahmawati et al., (2018) menentukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis berhasil dirumuskan:

H1= Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Gunawan et al., (2021) mendefinisikan sumber daya manusia sebagai suatu wadah dalam organisasi yang menjadi sumber ide dan inovasi individu terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan keuntungan finansial. Sumber daya manusia menjadi komponen penting dan berdampak pada kesiapan dan efektivitas dalam sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan pemerintah akan meningkatkan nilai data pelaporan keuangan pemerintah daerah kaitannya dengan kuantitas dan kualitas. Penyajian laporan keuangan sebagai contoh tugas yang sangat penting untuk menjaga keakuratan datanya dalam bisnis dan organisasi.

Menurut teori *stewardship*, sumber daya manusia berkualitas tinggi, didukung dengan latar belakang pendidikan yang layak, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan umum, dan memiliki pengalaman dalam bidang keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Apabila kompetensi sumber daya manusianya bagus, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan baik begitupun sebaliknya. Pada penelitian Binawati, (2022) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintah daerah akan diminta meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, termasuk dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan, karena semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Sudiarti & Juliarsa, (2020), Sundari & Rahayu, (2019), dan Dewi et al.,

(2022) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Perumusan hipotesisnya:

H2= Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dengan perkembangan teknologi yang baru-baru ini dan pemanfaatannya yang luas, maka dapat menjadi peluang bagi pihak-pihak yang berbeda untuk mengakses, memanipulasi, dan menggunakan informasi keuangan pemerintah daerah secara tepat dan akurat. Sikap atau tindakan seorang akuntan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tanggung jawab dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan disebut pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu teknologi yang digunakan dalam proses mengolah dan menyebarkan data dengan menggunakan komputer untuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam menghasilkan informasi yang berkualitas (Dewi et al., 2022).

Berkaitan dengan teori *stewardship* ini, kepuasan pelanggan dan kesuksesan organisasi erat hubungannya dengan penggunaan teknologi informasi. Sebuah organisasi dapat berhasil, jika principal dan manajemen memanfaatkan potensi mereka sebaik mungkin. Penggunaan teknologi informasi membantu dalam mengelola keuangan daerah serta meningkatkan proses transaksi, perhitungan yang lebih akurat dan penyiapan laporan keuangan atau output lainnya secara tepat waktu. Jika teknologi tidak digunakan dengan baik, maka akan terjadi konflik

antara pihak berkepentingan (*principal* dan *agent*) jika informasi laporan keuangan disampaikan kurang maksimal. Situasi ini membuktikan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangannya (Sundari & Rahayu, 2019). Diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Rahmawati et al., (2018), Swastiani et al., (2021), dan Nurhayati & Patadungan, (2022) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga, hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.